



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

jogja
istimewa

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016



DINAS PERHUBUNGAN DIY

Jalan Babarsari No 30 Depok Sleman DIY

Telp. (0274) 485775

Website: <http://dishub.jogjaprov.go.id>



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Februari 2017

PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DIY

Ir. GATOT SAPTADI

NIP. 19590902 198803 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan DIY yang dihasilkan di tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat, dengan indikatornya yaitu: Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan.

Adapun capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 9268 penumpang per hari dari target jumlah penumpang 9.750 penumpang per hari atau sebesar 95,06%. Jumlah capaian tersebut terdiri atas yang terdiri dari 8.824 penumpang Trans Jogja dan non Trans Jogja sebanyak 444 penumpang.

Sasaran 2: Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda, dengan indikatornya yaitu: Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 30,31% atau 100% dari yang ditargetkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan DIY ke depan. Pada sasaran pertama berhadapan dengan permasalahan (1) tingginya pemakaian kendaraan pribadi, (2) banyak bus yang kondisinya rusak dan kurang perawatan; (3) jumlah armada bus yang sedikit dengan terbatasnya jalur yang dioperasikan. Ketiga keadaan

tersebut menyebabkan penggunaan bus sebagai angkutan umum masih kurang diminati sehingga target jumlah penumpang harian tidak dapat terpenuhi.

Dalam rangka penataan sistem transportasi di DIY, peran strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebijakan serta pengendalian yang bersifat membatasi lalu lintas (*push strategy*) menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama stakeholder terkait. Selain itu perbaikan pelayanan angkutan umum perlu dilakukan dengan menggunakan *pull strategy*, yaitu strategi dalam menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1. Struktur Organisasi	2
I.2. Tugas dan Fungsi	3
I.3. Keadaan Pegawai.....	4
I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana	7
I.5. Keuangan	9
I.6. Sistematika LKjIP	9
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA.....	11
II.1. Perencanaan Strategis	11
II.1.1. Visi dan Misi.....	12
II.1.2. Tujuan dan Sasaran	13
II.1.3. Strategi	15
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	16
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2016	17
II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY	17
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	18
II.4. Instrumen Pendukung	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016	19
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	21
III.2.1. Sasaran Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat.	21
III.2.2. Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda.	23
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	27
III.4. Realisasi Anggaran	29
BAB 4 PENUTUP	32

Lampiran 1.	Struktur Organisasi	34
Lampiran 2.	Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)	35
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	36
Lampiran 4.	Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi Lkj Ip Tahun Sebelumnya	39
Lampiran 5.	Penghargaan Yang Pernah Diterima.....	40

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	4
Tabel I.2.	Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	5
Tabel I.3.	Jumah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	6
Tabel II.1.	Review Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY	12
Tabel II.2.	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY	14
Tabel II.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	16
Tabel II.4.	Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016	17
Tabel II.5.	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	18
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2016	20
Tabel III.3.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	21
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	24
Tabel III.5.	Bobot Program terhadap Capaian Sasaran.....	25
Tabel III.6.	Kegiatan yang Diperuntukkan bagi Transportasi Darat.....	26
Tabel III.7.	SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY	28
Tabel III.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016	30
Tabel III.9.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016	30

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
5. *Keuangan*
6. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan DIY
2. Mendorong Dinas Perhubungan DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Pimpinan : Kepala;
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
- UPT; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - c. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
 2. Seksi Angkutan Perkotaan; dan
 3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.
 - d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Sistem Teknologi Transportasi.
 - e. Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :

1. Seksi Teknik Bandara;
 2. Seksi Angkutan Udara; dan
 3. Seksi Keselamatan Transportasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja
1. Kepala
 2. Subbagian Tata Usaha
 3. Seksi Operasional dan Pengendalian
 4. Seksi Prasarana dan Prasarana
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1. Kepala
 2. Subbagian Tata Usaha
 3. Seksi Pengendalian Angkutan Barang
 4. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan DIY mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa, dan angkutan barang;
4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;

5. Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
6. Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan;
8. Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
9. Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
10. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;
11. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3. Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Perhubungan DIY berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	4	2	6
3	Pembina	IV/a	5	3	8
4	Penata Tk.I	III/d	9	7	16
5	Penata	III/c	15	3	28
6	Penata Muda Tk.I	III/b	75	28	103
7	Penata Muda	III/a	6	1	7
8	Pengatur Tk.I	II/d	3	-	3

9	Pengatur	II/c	5	3	8
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	1	3
11	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
12	Juru	I/c	1	-	1
13	Juru Muda	I/a	3	-	3
JUMLAH			140	48	188

Tabel I.2. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris	0	1	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kepala UPT	1	0	1
5	Kepala Seksi	11	2	13
6	Kepala Subbagian	1	4	5
7	Administrasi Perijinan	3	0	3
8	Analisis Angkutan Darat	2	1	3
9	Analisis Angkutan Udara	2	0	2
10	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	3	0	3
11	Analisis Pengembangan Sistem Operasi	1	0	1
12	Analisis Perencanaan Program dan Anggaran	1	3	4
13	Aparatur Sipil Negara	1	0	1
14	Bendahara	1	3	4
15	Inspektur Bandar Udara	1	1	2
16	Operator Jembatan Timbang	39	0	39
17	Pemegang Buku	0	2	2
18	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	0	5
19	Pemeriksa Keselamatan Darat (Jalan)	7	0	7
20	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	3	1	4
21	Penata Laporan Keuangan	1	2	3

22	Pengadministrasi Keuangan	3	4	7
23	Pengadministrasi Persuratan	0	2	2
24	Pengawas Keselamatan Angkutan	2	1	3
25	Pengawas Keselamatan Udara	2	0	2
26	Pengawas Lalu Lintas Darat	9	0	9
27	Pengawas Transportasi	5	0	5
28	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	1	2	3
29	Pengelola Administrasi Kepegawaian	1	3	4
30	Pengelola Barang	5	1	6
31	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	2
32	Pengelola Data Rekayasa Lalu Lintas	0	2	2
33	Pengelola Kearsipan	1	3	4
34	Pengelola Pemantauan	3	0	3
35	Pengelola Pendapatan	8	3	11
36	Pengelola Perizinan	2	1	3
37	Pengelola Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	1	1	2
38	Pengelola Sarana Angkutan	7	1	8
39	Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan	2	1	3
40	Pengemudi	1	0	1
41	Verifikator Keuangan	0	1	1
	JUMLAH	140	48	188

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Perhubungan DIY tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan yaitu:

Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	GOLONGAN	S2	S1	D4	D3	SMA/STM	SMP	SD	JUMLAH
1	IV/c	1	0	0	0	0	0	0	1
2	IV/b	3	2	0	0	0	0	0	5
3	IV/a	8	0	0	0	0	0	0	8

4	III/d	2	15	0	0	0	0	0	17
5	III/c	4	14	1	8	0	0	0	27
6	III/b	1	6	4	4	88	0	0	103
7	III/a	0	2	3	1	4	0	0	10
8	II/d	0	0	0	0	4	0	0	4
9	II/c	0	0	0	1	4	3	0	8
10	II/b	0	0	0	0	1	0	0	1
11	II/a	0	0	0	0	1	0	0	1
12	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0
13	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0
14	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I/a	0	0	0	0	0	0	3	3
	JUMLAH	19	39	8	14	102	3	3	188

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini telah digunakan seoptimal mungkin guna menunjang pelaksanaan operasional kegiatan di Dinas Perhubungan DIY. Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini yaitu:

1. Bangunan kantor yang digunakan yaitu gedung induk di Jalan Babarsari No 30, Kabupaten Sleman.
2. Dua gedung Terminal Tipe B :
 - a. Gedung Terminal Jombor (Kab. Sleman);
 - b. Gedung Terminal Wates (Kab. Kulonprogo).
3. Bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu:
 - a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunungkidul);
 - b. Pantai Baron (Kab. Gunungkidul);
 - c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul);
 - d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul);

- e. Pantai Glagah (Kab. Kulonprogo);
- f. Waduk Sermo (Kab. Kulonprogo).

Selain berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana yang ada saat ini yaitu:

1. Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan DIY terdiri dari:
 - a. Kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh)
 - b. Kendaraan roda 4 sebanyak 14 (empat belas)
 - c. Ambulance sebanyak 1 unit;
 - d. Kendaraan pemadam kebakaran sebanyak 1 unit;
 - e. Kendaraan khusus VMS sebanyak 1 unit;
2. Jaringan sistem informasi

Guna mendukung kinerja Dinas Perhubungan DIY menuju *Good Government* dan peningkatan pelayanan yang akuntabel dan efektif di lingkup Pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta, sampai dengan tahun 2016, jaringan infrastruktur komputer Dinas Perhubungan DIY mempunyai Managed Router 3 unit, unmanaged router/switch 16 unit dan jumlah access point 10 unit dengan port fisik tersedia 258 port/client dan yang aktif terpakai 137 port/client.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan beban pekerjaan. Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, menyebutkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Padahal mulai dari tahun 2016 Dinas Perhubungan sudah terpisah dengan Dinas Kominfo, untuk itu diperlukan juga adanya revisi Peraturan Gubernur mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

I.5. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2016, Urusan Perhubungan melaksanakan 12 (dua belas) Program dan 61 (enam puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 90.337.788.795,00 yang dibiayai dari APBD. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran mencapai Rp. 82.735.556.019,00 atau 91,58%, sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 98,9% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan yang mengalami deviasi sebesar 8,42 % disebabkan antara lain oleh efisiensi anggaran perjalanan dinas, dan ekspose kegiatan serta pemeliharaan peralatan.

Adapun untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan guna mendukung urusan perhubungan sebagai penyedia sarana dan prasarana transportasi, Dinas Perhubungan mendapat alokasi dana keistimewaan Rp. 7.296.459.259,00 dengan melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan.

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perhubungan DIY tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan DIY Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan DIY dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2016*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1. Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama empat tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Nomor 050/071 Tentang Review Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Tanggal 12 Januari 2015 Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Perhubungan DIY sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program

kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY.

Tabel II.1. Review Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Layanan Publik pada penataan sistem transportasi meningkat	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan
2. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda	Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif dan efisien serta berkeselamatan tinggi

II.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi :

Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY

Untuk mewujudkan yang telah tertuang dalam visi diturunkan misi sebagai upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Dinas Perhubungan DIY adalah:

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah selama 5 tahun anggaran adalah

- 1) Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi;

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;

Tabel II.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD					Keterangan
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatnya Load Factor Penumpang Angkutan Umum		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sebelum Review
	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	Pnp/ Hari	n/a	n/a	9.500	9.750	10.145	Setelah Review
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sebelum Review
	Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif dan efisien serta berkeselamatan tinggi	%	8,29	15,83	22,37	30,31	43,03	Setelah review

II.1.3. Strategi

Guna mendukung arah kebijakan ini ditempuh strategi dalam penataan sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan program-program urusan Perhubungan yaitu.

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 5) Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 6) Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
- 7) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
- 8) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
- 9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 10) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)

Untuk mewujudkan program prioritas ditopang oleh kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan angkutan umum *buy the service*; kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan, Taksi, angkutan AKPD dan Perbatasan; kegiatan pengendalian perizinan di bidang Perhubungan; serta kegiatan Pengawasan dan pengendalian Kendaraan bermotor.

Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung program urusan Perhubungan adalah Kegiatan Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan, Kegiatan Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas, Kegiatan Pengadaan, Kegiatan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan, Kegiatan Pengadaan Marka, Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ), Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL), Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Sarana dan Prasarana Pengendalian Angkutan, Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayaran, Kegiatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Fasilitas Jalan Rel.

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016:

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA*	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1.	Layanan Publik Pada Penataan Sistem Transportasi Meningkat	Penumpang Yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan	Orang	9,750	Triwulan I	9,950
					Triwulan II	9,783
					Triwulan III	10,001
					Triwulan IV	9,626
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Efektif, Efisien, Berteknologi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda	Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif , Efisien dan Berkeselamatan Tinggi	%	30,31	Triwulan I	24,12
					Triwulan II	26,14
					Triwulan III	29,10
					Triwulan IV	30,31

II.3. Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 117.191.361.905,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 102.891.096.583,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 12.553.307.788,- dan Belanja Langsung Rp. 90.337.788.795,-.

Selain dari anggaran murni, Dinas Perhubungan DIY juga mengelola anggaran dari Dana Keistimewaan sebesar Rp. 8.100.000.000,-. Melalui mekanisme perubahan Dana Keistimewaan yang dikelola menjadi Rp. 7.296.459.259,-.

II.3.1. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY

Tabel II.4. Target Belanja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.553.307.788,-	11%
Belanja Langsung	Rp. 90.337.788.795,-	82%
Belanja Langsung Dais*	Rp. 7.296.459.259,-	7%
Jumlah	Rp. 110.187.555.842,-	100%

II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Perhubungan DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat	63.464.368.329	65%	Dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Efektif, Efisien, Berteknologi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda	34.169.879.725	35%	Dialokasikan untuk program selain Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

II.4. Instrumen Pendukung

Penerapan SAKIP di Dinas Perhubungan DIY menggunakan sistem yang sampai saat ini sistem ini masih cukup efektif, yaitu setiap bulan PPTK memberikan laporan rutin pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Pengumpulan data melalui berbagai cara baik lisan, tertulis dan juga melalui surel khususnya untuk pengiriman data hasil dokumentasi kegiatan. Kompilasi data dilakukan oleh petugas monitoring evaluasi dan sesudah selesai proses kompilasi data ditindaklanjuti dalam pertemuan pimpinan dan atau PPTK untuk menentukan langkah-langkah berikutnya untuk tercapainya sasaran organisasi.

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	Orang/ hari	9.750	9.268	95,06	Sangat Baik
2	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda	Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi	%	30,31	30,31	100	Sangat Baik

Dari tabel di atas Sasaran 1 tidak dapat mencapai 100% karena terkendala dengan permasalahan (1) tingginya pemakaian kendaraan pribadi (2) banyak bus yang kondisinya rusak dan kurang perawatan; dan (3) jumlah armada bus yang sedikit dengan terbatasnya jalur yang dioperasikan. Ketiga keadaan tersebut menyebabkan penggunaan bus sebagai angkutan umum masih kurang diminati sehingga target jumlah penumpang harian tidak dapat terpenuhi.

Sasaran 2 telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% karena 9 (sembilan) program reguler dan 1 (satu) program urusan keistimewaan yang mendukung dapat terlaksana dengan baik.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat.

Tolok ukur capaian sasaran Layanan Publik pada Penataan Sistem Transportasi Meningkat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan. Perhitungan penumpang dilakukan dengan menjumlahkan penumpang harian angkutan Trans Jogja dan angkutan perkotaan reguler.

Tabel III.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	Pnp/hr	n/a	9.750	9.268	95,1	10.145

Tolok ukur capaian sasaran Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat yaitu Penumpang Yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan. Angkutan umum diasumsikan sebagai transportasi umum dengan rute yang ditentukan dan dapat menampung penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Karena peningkatan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan

peningkatan kapasitas jalan merupakan masalah yang dihadapi semua kota besar yaitu kemacetan di jalan maka angkutan umum hadir sebagai salah satu pemecahan yang efektif. Terkait dengan ini bus Trans-Jogja sebagai angkutan perkotaan berbasis sistem *buy the service* yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan dinilai menjadi angkutan unggulan di DIY. Angkutan umum perkotaan juga termasuk penumpang angkutan reguler perkotaan non Trans Jogja yang dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dimana saja.

Untuk mencapai target kinerja sasaran Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat di tahun 2016 telah ditempuh program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang ditopang dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*. Kegiatan dimaksud telah menyelenggarakan operasional Trans Jogja sebanyak 8 jalur dengan 67 armada sedangkan untuk meningkatkan pelayanannya telah dikembangkan halte portable dan prasarana operasional Trans Jogja seperti mesin aktivasi (Top UP EDC) sebanyak 132 unit, microcontroller sebanyak 100 unit, perangkat olah data sebanyak 74 unit dan printer tiket.

Untuk mendukung penyelenggaraan program peningkatan pelayanan angkutan umum juga dilaksanakan kegiatan lain yaitu (1) melakukan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan, Taksi, angkutan AKDP dan Perbatasan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelaikan operasi dan tertib perijinan armada, (2) melakukan pengendalian perijinan di bidang Perhubungan untuk ketersediaan layanan 3.000 kendaraan bagi masyarakat di DIY dan (3) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pada 5 (lima) unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi pelayanan angkutan umum di DIY yaitu (1) menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Perkeretaapian di DIY, dan (2) Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point Dan Park and Ride berupa pembangunan tahap awal Park and Ride di Gamping, Sleman untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan pelaksanaan program tersebut pada Tahun 2016, maka capaian indikator “Penumpang Yang Terlayani Angkutan Umum Perkotaan” sebesar 95,1% dari target. Realisasi pada tahun 2016, jumlah penumpang angkutan umum perkotaan adalah 9.268 penumpang per hari yang terdiri dari Penumpang angkutan Trans Jogja sebesar 8824 penumpang per hari dan penumpang angkutan reguler non Trans Jogja sebesar 444 penumpang per hari. Tidak terpenuhinya target di Tahun 2016 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (1) Time Table Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan (2) Kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pada Tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, namun masih ada 29 (dua puluh sembilan) armada yang perlu diremajakan.

Sedangkan untuk mencapai target sebesar 33.372 di tahun 2017 maka dilakukan beberapa upaya antara lain adalah (1) penambahan jalur bus dari 8 (delapan) jalur menjadi 17 (tujuh belas) jalur dan (2) penambahan armada dari 74 (tujuh puluh empat) armada menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) armada. Pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) bus yang peruntukannya 54 (lima puluh empat) bus untuk penambahan layanan dan 29 (dua puluh sembilan) bus untuk peremajaan, dan (3) peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte.

III.2.2. Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda.

Tolok ukur capaian sasaran Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan Efisien dan

Berkeselamatan Tinggi. Perhitungan indikator ini merupakan hasil pembobotan dari program:

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
4. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6. Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
7. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
8. Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
9. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
10. Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan Berkeselamatan Tinggi	%	22,37	30,31	30,31	100	43,03

Tolok ukur capaian Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yaitu Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan Efisien dan Berkeselamatan Tinggi.

Untuk mencapai kinerja dari sasaran ini di tahun 2016 telah ditempuh program: Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan; Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas; Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal; Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi; dan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan.

Dari program program diatas mempunyai indikator program yang masing masing mempunyai bobot yang berkontribusi terhadap sasaran Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda untuk mencapai target 100%.

Tabel III.5. Bobot Program terhadap Capaian Sasaran

No	Indikator Program	Pembobotan (%)
1	Peningkatan Pelayanan Transportasi Antar moda	10
2	Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	2,5
3	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan	5
4	Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	2,5
5	Penerapan Sistem parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY	15
6	Peningkatan Dukungan fasilitas Keselamatan LL	20
7	Penerapan Manajemen LL Berbasis Kawasan	15
8	Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	15
9	Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	15

Sarana dan prasarana yang menyumbang kontribusi besar terhadap tolok ukur capaian ini adalah angkutan jalan dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas transportasi darat.

Tabel III.6. Kegiatan yang Diperuntukkan bagi Transportasi Darat

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	50 (lima puluh) ruas jalan dan 35 (tiga puluh lima) simpang untuk penanganan dan pengendalian lalulintas pada ruas jalan nasional di Perkotaan Yogyakarta
2.	Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas	Perencanaan kawasan Kranggan dan kawasan Seturan serta Kajian Penerapan Simpang Bersinyal di Simpang SMKN 1 Depok (Maguwo).
3.	Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas	Penataan dan Pengendalian Kawasan Terban termasuk pemasangan fasilitas keselamatan jalan
4.	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan	Pemasangan controler ATCS sebanyak 4 (empat) unit untuk mendukung pengendalian simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebanyak 50%
5.	Pengadaan Marka	Marka 10.500 meter
6.	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ)	LPJ sebanyak 108 unit dan LPJ Tenaga Surya sebanyak 28 unit,
7.	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	APILL 3 unit
8.	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Rambu 180 unit
9.	Sarana dan Prasarana Pengendalian Angkutan	3 (tiga) Jembatan Timbang

10.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Rambu Lallin (175 buah), APILL (48 Lokasi), Warning Light (20 lokasi), Rehab Berat APILL (3 lokasi), Pengecatan Tiang APILL (48 lokasi), dan LPJU (34 unit)
11.	Fasilitas Jalan Rel	Early Warning System (1 unit).

Sedangkan sarana dan prasarana transportasi lain berupa kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) dengan fasilitas prasarannya yang juga telah berkontribusi terhadap target di tahun 2016 adalah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayaran yaitu berupa pemeliharaan terhadap SBNP (14 unit), Speed Boat (3 unit), Garasi Apung (3 unit), Dermaga LLASDP Sermo (1 unit), Ponton Apung (1 unit), dan Lampu Navigasi (1 unit).

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah, maka untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI telah menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY (Tabel III.7), terdapat 2 (dua) indikator untuk jenis pelayanan dasar yaitu Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan. Faktor pendukung pencapaian ini adalah dukungan anggaran APBD maupun APBN melalui DAK dan Dana Keistimewaa sehingga fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan guardrail serta penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi dapat terlaksana.

Tabel III.7. SPM Bidang Perhubungan Pemda DIY

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai (%)	2015 (%)	2016 (%)	GAP 2016 (%)
1	Angkutan Jalan	1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100	97,18	81,44	18,56
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100	50	50	50
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	3. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60	81,89	85,85	0
			a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Provinsi.	60	65,50	69,89	0
			b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	60	98,29	101,81	0
		4. Keselamatan	4. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100	100	100	0
		5. Sumber Daya Manusia (SDM)	5. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100	0	66,67	33,33

Sedangkan ada 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai yaitu jenis pelayanan dasar untuk Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan, Jaringan Prasarana Angkutan Jalan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah (1) telah terjadi penambahan status ruas jalan provinsi dari 71 ruas jalan menjadi 97 ruas jalan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 118/KEP/2016 tanggal 26 Mei 2016 sehingga terjadi penurunan capaian tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan di Jalan Provinsi dari 97,18% pada tahun 2015 menjadi 81,44% pada tahun 2016, (2) berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan Terminal Tipe A beralih ke Pemerintah Pusat sehingga pencapaian indikator tersedianya terminal angkutan Penumpang Tipe A tergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan (3) penyediaan SDM sangat tergantung dengan kewenangan Dinas Perhubungan DIY, sehingga baru tercapai 66,67% karena pada Tahun 2016, Dinas Perhubungan DIY tidak memiliki kewenangan pengelolaan terminal.

III.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,78%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,60%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di Sasaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Efektif, Efisien, Berteknologi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda (98,62%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di Sasaran Layanan publik pada Penataan Sistem Transportasi Meningkatkan (88,88%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel III.8.

Tabel III.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat	9.750	9.268	95,1	63.464.368.329	56.404.017.192	88,88
2	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda	30,31	30,31	100,0	34.169.879.725	33.481.230.727	97,98
Jumlah					97.634.248.054	89.885.247.919	92,06
Total Belanja Langsung					97.634.248.054	89.885.247.919	92,06

Adapun untuk anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan setiap program/kegiatan disajikan dalam tabel III.9.

Tabel III.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016

No	Program	Anggaran*			Ket.
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat					
1.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	63.464.368.329	56.404.017.192	11,12	
Jumlah		63.464.368.329	56.404.017.192	11,12	

No	Program	Anggaran*			Ket.
		Target	Realisasi	% Deviasi	
Sasaran 2: Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda					
2.	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	4.808.362.300	4.790.206.674	0,38	
3.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	303,832,239	303,732,000	0,03	
4.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	7,101,131,167	7,064,580,150	0,51	
5.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	40,938,300	33,018,500	19,35	
6.	Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	1,603,544,343	1,592,563,785	0,68	
7.	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	611,805,950	611,805,950	0,00	
8.	Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	2,072,945,000	1,972,348,500	4,85	
9.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	3.159.368.767	3.107.380.753	1,65	
10.	Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	6,407,614,259	6,260,846,900	2.29	
11.	Program Penataan Ruang Keistimewaan Diy	888,845,000	888,845,000	0,00	
Jumlah		34.169.879.725	33.481.230.727	2,02	
Total Belanja Langsung		97.634.248.054	89.885.247.919	7,94	

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan DIY pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke-4 dari Rencana strategis Dinas Perhubungan DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

IV.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016, 1 (satu) indikator yaitu Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda telah memenuhi target yang ditetapkan atau mencapai sebesar 100%. Sementara itu, untuk indikator Layanan Publik Pada Penataan Sistem Transportasi Meningkat dari target jumlah penumpang harian yang dilayani sebanyak 9.750 penumpang per hari, baru tercapai sebanyak 9.268 penumpang per hari atau baru mencapai 95,1% dari target yang ditetapkan.
- b. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada sasaran Layanan Publik Pada Penataan Sistem Transportasi Meningkat, antara lain :
 - i. Time Table Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat,

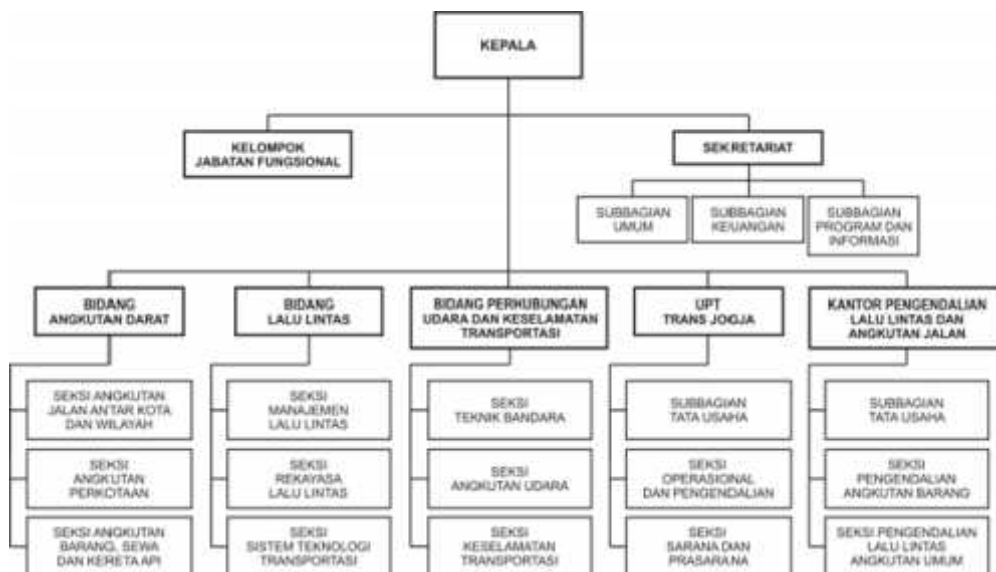
- ii. Kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km.

IV.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/**Rencana Aksi** sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, namun masih ada 29 (dua puluh sembilan) armada yang perlu diremajakan.
- b. Untuk mencapai target sebesar 33.372 penumpang per hari di tahun 2017 maka dilakukan beberapa upaya antara lain:
 - i. penambahan jalur bus dari 8 (delapan) jalur menjadi 17 (tujuh belas) jalur,
 - ii. penambahan armada dari 74 (tujuh puluh empat) armada menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) armada. Pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) bus yang peruntukannya 54 (lima puluh empat) bus untuk penambahan layanan dan 29 (dua puluh sembilan) bus untuk peremajaan, dan
 - iii. peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte.

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 2. PERENCANAAN STRATEGIS (MATRIKS RENSTRA LIMA TAHUN)

Misi 4 : Memantapkan prasarana dan sarana daerah
 Tujuan : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik
 Sasaran : Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017
Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Meningkatnya Load Factor Penumpang Angkutan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	n/a	n/a	9.500	9.750	10.145
SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;	Tersedianya Sarana Dan Prasarana yang efektif, Efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda	Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan keselamatan tinggi	8,29	15,83	22,37	30,31	43,03

LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Belandari No. 30, Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 487335
Faksimili (0274) 485405 Website: <http://www.dishub.jogjaprov.go.id>
Email: dishub@dislaprov.go.id Kode Pos 55281

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.SIGIT HARYANTA, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan DIY
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2016

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan DIY

Ir.SIGIT HARYANTA, MT
NIP. 19620328 199003 1 003

PERENCANAAN KINERJA REGIONAL II
 : Landa Pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta
 : 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran

No	Sistem Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tindakan	Target
(1)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)
1	Layanan publik pada pelayanan sistem transportasi masyarakat	Peningkat yang layanan angkutan umum perkotaan	orang	3.75	Tindakan I Tindakan II Tindakan V	9.990 9.783 30.000 9.626
2	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda	Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan dinas	%	20,51	Tindakan I Tindakan II Tindakan III Tindakan IV	74,17 36,14 79,10 40,31

Jumlah Anggaran			
1.	Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 106.283.600.000	Keterangan Anggaran A-BD Anggaran Dana Kasnonwason Anggaran Dekonsentrasi
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 4.936.473.900.00	
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 71.064.758.477.00	
4.	Program Peningkatan dan Penguatan Lalu Lintas	Rp. 374.000.000.00	
5.	Program Peningkatan Kelangkaan Penguasaan Kendaraan Bermotor	Rp. 7.325.776.100.00	
6.	Program Peningkatan Manajemen dan Kelembagaan Lalu Lintas	Rp. 50.725.200.00	
7.	Program Penguatan Sistem Sinyal Berhenti	Rp. 1.635.069.600.00	
8.	Program Penguatan dan Penguasaan Koneksi Transportasi	Rp. 621.721.940.00	
9.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 2.170.842.200.00	
10.	Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keseluruhan	Rp. 3.192.364.750.00	
11.	Program Penguatan Transportasi Berbasis Keseluruhan	Rp. 8.100.000.000.00	
12.	Program Penguatan Administrasi Perhubungan	Rp. 3.780.726.670.00	
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan	Rp. 4.552.455.453.00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 180.057.125.00	

Yogyakarta, 29 Januari 2016



**LAMPIRAN 4. TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN
SEBELUMNYA**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Babarsari No. 30, Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 487335,
Faximili (0274) 485405 Website: <http://www.dishub.jogjaprov.go.id>
Email: dishub@jogjaprov.go.id Kode Pos 55281

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
Dinas Perhubungan DIY**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut

Plt. Kepala Dinas Perhubungan DIY

Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003

LAMPIRAN 5. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

Pada Tahun 2016, Dinas Perhubungan DIY meraih piala Wahana Tata Nugraha (WTN). WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Ini merupakan penghargaan kepada Dinas Perhubungan DIY selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.



Foto. Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016